

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012
- Aria Suyudi, Eryanto nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Dimensi, Jakarta, 2004
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek hukum kepailitan, perusahaan, dan asuransi*, Alumni, Bandung, 2007
- Cst.Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Doni Budiono, “*Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Jhaper: Vol. 4, No. 2, 2018
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010
- Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta
- Jono, S.H., *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004*.Yogyakarta: Liberty. 2005
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004
- Sinaga, S. M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta, Tatanusa.
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta
- Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta, Kencana, 2019
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. Makalah, Jurnal, Majalah, dan lain-lain

Acep Rohendi, *“Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor Dengan Para Kreditor”*, *Jurnal Selisik* Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 64.

Adriel Michael Tirayo, Yoefanca Halim. *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2) Desember 2019.hlm.130-137.

Dalam Penjelasan Umum UU (No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan PKPU*, *Fokusmedia*, dikutip dari *Rahayu Hartini*, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan*, Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.69.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.154.

Jurnal Ilmiah “Advokasi 04. No. 01. Maret 2016

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2) Desember 2019, hlm.130-137.

Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September.

Kristiyani, *Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor: 01/Pailit/2008/Pengadilan Negeri Semarang)* Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008, hlm.22.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor: 01/PDT.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Mks, PT. Semen Bosowa Maros temohon PKPU terhadap Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren, (2021). hlm. 27.

Rindy Ayu Rahmadiyah, *“Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, *Notarius*, Edisi 8, No. 2 (September, 2015). *E-Journal Undip*, hlm. 260.

Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.hlm. 24.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.hlm.595,

Yusmita, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Kreditor Dalam Melakukan Perjanjian Baku*”, ”Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1, 2019. hlm. 62.

